

**ANALISIS RENCANA IMPLEMENTASI
PERMENKES NOMOR 30 TAHUN 2019
(STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT AMAL USAHA
KESEHATAN MUHAMMADIYAH)**

*Analysis The Implementation Plan for Permenkes Number 30 of 2019
(Case study on Hospital Muhammadiyah Health Business Charity)*

Iwan Toniro, Arlina Dewi

Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit, Program Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

INTISARI

Latar Belakang: Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 merupakan peraturan yang baru diterbitkan oleh Menteri Kesehatan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab, rumah sakit dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka mengarahkan dan meningkatkan pengelolaannya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 terhadap amal usaha Muhammadiyah.

Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *fenomenology*. Populasi penelitian ini adalah seluruh amal usaha kesehatan Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Hasil Penelitian: Penelitian ini mendapatkan beberapa hasil, yaitu kekhawatiran yang muncul pada sistem rujukan karna adanya pembatasan jumlah pelayanan di setiap tipe kelas rumah-sakitnya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 berdampak positif secara umum dimana Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 dianggap Kementerian Kesehatan sebagai solusi rujukan berjenjang yang dirancang, selama ini banyak rujukan berhenti di rumah sakit D dan C dan menyebabkan rumah sakit yang berada di atasnya ingin turun kelas, regulasi penetapan dialisis dinilai masih belum jelas, amal usaha kesehatan Muhammadiyah tipe D dan C tidak bisa melakukan pelayanan dialisis, PMK 30 menyulitkan langkah amal usaha kesehatan Muhammadiyah dalam penentuan kelas rumah sakit, PMK 30 dinilai merugikan amal usaha kesehatan Muhammadiyah, dan amal usaha kesehatan Muhammadiyah sudah tidak bisa menyicil untuk kenaikan kelas.

Kesimpulan: Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan memiliki dampak terhadap amal usaha kesehatan Muhammadiyah.

Kata Kunci: PMK 30, Permenkes 30, Peraturan Menteri Kesehatan, Kebijakan, Sistem Rujukan

ABSTRACT

Analysis The Implementation Plan for Permenkes Number 30 of 2019 (Case study on Hospital Muhammadiyah Health Business Charity)

Iwan Toniro, Arlina Dewi

*Master of Hospital Administration, Postgraduate Program,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Background: Minister of Health Regulation number 30 is a new regulation issued by the Minister of Health in an effort to provide services in hospitals that are professional and responsible, hospitals with complex characteristics and organizations need legal certainty and protection in order to direct and improve their management and to implement the provisions of Article 24 paragraph (4) and Article 28 of Law Number 44 Year 2009 concerning Hospitals. This study aims to determine the impact caused by the Minister of Health Regulation number 30 of 2019 on Muhammadiyah business charities.

Method: This type of research is descriptive qualitative research with a case study approach. The population of this research are all Muhammadiyah health endeavors throughout Indonesia.

Results and Discussion: This study obtained several results, the concern that arises in the referral system is because of the limited number of services in each type of hospital class, PMK 30 of 2019 has a positive impact in general PMK number 30 considered the Ministry of Health as a tiered reference solution designed, during this time many references stopped in hospitals D and C causing hospitals that are above it want to go down class, the regulation on determining dialysis is still unclear, Muhammadiyah health businesses type D and C cannot do dialysis services, PMK 30 complicates steps Muhammadiyah health business charity in determining the hospital class, PMK 30 is considered detrimental Muhammadiyah health business charity, and Muhammadiyah's health business charity could not be paid in installments for a class increase.

Conclusion: The results of this study found that the Minister of Health's Regulation had an impact on Muhammadiyah's health business charity.

Keywords: PMK 30, Permenkes 30, Minister of Health Regulations, Policy, Referral System